

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG DESTINASI PRIORITAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh
Ahmad Damir Idi
18030047
(ABSTRAK)

Berlimpahnya sumber daya alam dan budaya telah menjadi perhatian spesifik bagi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan perekonomian yang berbasis industry kepariwisataan. Apalagi didukung dengan letak geografis yang sangat strategis karena Indonesia dikualifikasikan sebagai negara kepulauan dengan corak budaya yang heterogen telah menambah objek potensial destinasi pariwisata yang akan memberikan stimulus terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena pariwisata dianggap sebagai sector penting dan sangat menjanjikan bagi perkembangan perekonomian, maka pada tahun 2016 Pemerintah mengambil kebijakan strategis dengan mendorong destinasi di daerah-daerah dengan menetapkan 10 destinasi prioritas dan salah satu adalah Kabupaten Pulau Morotai. Penetapan Pulau Morotai dalam 10 destinasi prioritas didukung dengan beragam alasan, mulai potensi sumber daya alam, budaya, hingga secara geografis Pulau Morotai memiliki keunikan tersendiri karena berada dibibir pasifik, serta memiliki kekayaan peninggalan Perang Dunia II.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mendorong perkembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai?. *Kedua*, bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga dapat menjabarkan peran dan strategi pemerintah daerah dalam merespon kebijakan strategis pemerintah pusat mengenai destansi prioritas.

Penelitian ini mendeskripsikan bahwa, *Pertama*, peran pemerintah daerah dalam merespon kebijakan pemerintah pusat mengenai 10 destinasi prioritas sangat signifikan. Hal itu diimplementasikan melalui langkah kongkrit pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan upaya melakukan promosi potensi-potensi destinasi wisata di Pulau Morotai baik melalui event-event maupun sarana public. Selain itu, perkembangan pariwisata di Pulau Morotai juga didukung dengan kebijakan strategis pemerintah daerah dengan mendorong peningkatan infrastruktur pariwisata (membangun fasilitas-fasilitas pariwisata) dan aksesibilitas untuk mempermudah pengunjung menjangkau destinasi wisata di Pulau Morotai. *Kedua*, langkah strategis untuk mendorong pengembangan pariwisata, pemerintah daerah bekerjasama dengan investor (pihak swasta) untuk menyediakan fasilitas penerbangan (hongkong-morotai-bali), resort, hotel, dan lain-lain

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pariwisata*

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG DESTINASI PRIORITAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh
Ahmad Damir Idi
18030047

ABSTRAK

The abundance of natural and cultural resources has become a specific concern for the Government of Indonesia to develop an economy based on the tourism industry. Moreover, it is supported by a very strategic geographical location because Indonesia is qualified as an archipelago country with a heterogeneous cultural style which has added potential objects of tourism destinations that will provide stimulus to the development of the Indonesian economy. Because tourism is considered an important and very promising sector for economic development, in 2016 the Government adopted a strategic policy by encouraging destinations in the regions by setting 10 priority destinations and one of them is Morotai Island Regency. The determination of Morotai Island in 10 priority destinations is supported by a variety of reasons,

The formulation of the problem in this study is, First, how is the role of the Regional Government in encouraging the development of tourism in the Morotai Island Regency ?. Second, what is the strategy of the Regional Government in following up the Central Government's policies? This research is a type of qualitative research with a descriptive approach, so that it can describe the roles and strategies of local governments in responding to the central government's strategic policies regarding priority destinations.

This study describes that, First, the role of local governments in responding to the central government policy regarding 10 priority destinations is very significant. This was implemented through the concrete steps of the local government of Morotai Island Regency with efforts to promote the potential of tourist destinations on Morotai Island both through events and public facilities. In addition, the development of tourism on Morotai Island is also supported by the strategic policies of the local government by encouraging the improvement of tourism infrastructure (building tourism facilities) and accessibility to facilitate visitors to reach tourist destinations on Morotai Island. The Regional Government also provides understanding and understanding to the public regarding community participation in tourism development. Second,

Keywords: Central Government Policy, Local Government, and Tourism